



## Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Surabaya

Yuli Eka Purwanti<sup>a</sup>, Erny Roesminingsih<sup>b</sup>, Karwanto<sup>c</sup>, Amrozi Khamidi<sup>d</sup>, Budi Purwoko<sup>e</sup>, Muffarihul Hazin<sup>f</sup>

<sup>a,b,c,d,e,f</sup>Universitas Negeri Surabaya, Manajemen Pendidikan, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Surabaya dan dampaknya terhadap kinerja pendidik sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket, serta analisis data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidik memiliki komitmen tinggi dan berupaya menerapkan strategi pembelajaran yang variatif sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, terdapat hambatan signifikan seperti kekurangan fasilitas, sumber daya manusia yang kompeten, dan kebutuhan pelatihan khusus. Selain itu, faktor seperti beban kerja dan stigma masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif. Kebijakan ini tetap menunjukkan potensi keberhasilan melalui dukungan sistemik, kolaborasi orang tua, dan peran guru pendamping khusus, namun memerlukan peningkatan fasilitas dan pelatihan untuk mencapai efektivitas optimal.

**Kata Kunci** : Kebijakan Public, Kebijakan Pendidikan Inklusif, Kinerja pendidik

### Abstract

*This study is a literature review aimed at evaluating the policy related to the integration of the Basic Education Data (Dapodik) with the online New Student Admissions (PPDB) system in public junior high schools under the auspices of the Bojonegoro Regency Education Office. This integration is considered crucial for building a more open, effective, and accountable education system supported by accurate data. This study examines a number of related literature sources, regulations, and policy documents to explore the challenges, opportunities, and consequences of this policy on the implementation of online PPDB. The results of the study indicate that although the integration of data between Dapodik and online PPDB can strengthen data validity, improve data accuracy, and accelerate the selection process, its implementation still faces technical obstacles, limited human resource capacity, and disparities in facilities across schools. Therefore, it is necessary to improve coordination between relevant parties, strengthen the technical capabilities of school operators, and adapt regulations responsive to local conditions. The results of this study are expected to contribute as considerations in the development of policies for a more integrated and sustainable education system.*

**Keywords:** Data Pokok Pendidikan, PPDB Online, Kebijakan Pendidikan

Submitted: 31-09-2025 Approved: 31-10-2025. Published: 05-11-2025

Corresponding author's e-mail: [24010845155@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010845155@mhs.unesa.ac.id)

ISSN: Print 2722-1504 | ONLINE 2721-1002

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/jpg/index>

## **INTRODUCTION**

Pendidikan bagi setiap bangsa merupakan Upaya perubahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari bangsa tersebut. Menurut Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan merupakan ikhtiar yang terencana dalam mewujudkan kondisi belajar serta proses pembelajaran yang mendorong peserta didik menggali potensi diri. Hal ini mencakup spiritual, penguasaan diri, karakter, intelektualitas, akhlak yang luhur, serta kemampuan praktis yang berguna bagi pribadi, lingkungan sosial, dan negara (UU No.20 tahun 2003). Pendidikan Inklusif termasuk didalamnya sebagai Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ini. Implementasi pendidikan inklusif ini merupakan salah satu mandat UU no. 20 tahun 2003 untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi semua generasi penerus bangsa tak terkecuali untuk peserta didik berkebutuhan khusus (Masnu'ah et al., 2022). Hal ini diharapkan untuk meninggalkan stigma negatif serta menghindari sifat diskriminatif dalam lingkungan sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sebagai penerus bangsa (Munajah et al., 2021).

Pendidikan di Indonesia seiring perkembangan zaman terjadi transformasi dan revolusi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Pendidikan Inklusif menjadi salah satu perubahan dalam pendidikan nasional. Sekolah inklusif merupakan salah satu realisasi usaha pemerintah untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pengalaman belajar yang setara layaknya peserta didik pada umumnya (Anjarwati et al., 2022). Alternatif Solusi dalam pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam konteks penyeteraan juga dapat dilakukan di sekolah umum. Pendidikan inklusif di sekolah umum juga telah diatur dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan inklusif menyediakan akses belajar bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus serta potensi kecerdasan atau bakat Istimewa untuk pengalaman pendidikan yang setara dalam satu lingkungan yang sama dengan peserta didik lainnya (Susilowati et al., 2022).

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia belum mencapai tahapan yang diharapkan. Salah satu penerapannya di SMA Negeri 3 Bukit tinggi terbilang kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kurikulum inklusif yang sesuai, belum adanya guru pendamping khusus (GPK), serta kurangnya pemahaman guru terkait mengenai pendidikan inklusif (Pardede et al., 2020). Faktor lain yang menghambat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Guru pendamping khusus yang seharusnya membimbing peserta didik berkebutuhan khusus sangatlah terbatas dan belum mencukupi kebutuhan di setiap sekolah (Saradia Agustina & Rahaju, 2021). Hal tersebut memaparkan bahwa pendidik menjadi garda terdepan pada proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif.

Dewasa ini pendidik dituntut untuk menjadi guru yang mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dalam hal ini termasuk kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Selayaknya pendidik di SMPN 30 Bandung yang menjadi role model pendidikan inklusif di kota Bandung. Pendidik di kota Bandung diwajibkan untuk dapat menangani

peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik dalam proses pembelajaran (Musfira et al., 2022). Pandangan lain menunjukkan bahwa pendidik memang harus menguasai kemampuan dalam mengelola pendidikan inklusif di sekolah umum. Tantangan yang dihadapi pendidik tentunya lebih beragam dan luas. Pendidik menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik yang beragam termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidik juga membina lingkungan kelas yang mendorong partisipasi, kesetaraan, keadilan sosial serta mengakomodasikan latar belakang maupun kebutuhan (Holmqvist & Lelling, 2021).

Kondisi tersebut menjadikan kinerja pendidik sebagai fasilitator perlu ditekankan. Kinerja pendidik berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Kinerja pendidik memiliki nilai yang signifikan positif terhadap hasil belajar jika pendidik memiliki motivasi kerja yang tinggi (Amtu et al., 2020). Kualitas kinerja pendidik memang penting untuk dikaji dalam usaha meningkatkan pencapaian peserta didik. Kepemimpinan kepala sekolah, Kultur organisasi, dan Kompetensi pendidik menjadi beberapa faktor yang berpengaruh signifikan sebesar 68,12 % pada kinerja pendidik. Potensi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pendidik diperlukan kebijakan yang mengakomodasikan eksistensi faktor tersebut (Kanya et al., 2021).

Berdasarkan problematika diatas belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai dampak dari implementasi kebijakan terhadap kinerja pendidik. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana dampak kebijakan pendidikan inklusif pada kinerja pendidik sekolah dasar di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan pendidikan inklusif menggunakan teori George C. Edward III terhadap kinerja pendidik sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dampak yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terhadap kondisi kinerja pendidik.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data non-numerik untuk memahami fenomena sosial, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan detail kontekstual. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kasus, proses, atau mekanisme tertentu, bukan sekadar generalisasi yang luas (Gerring, 2025). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, serta angket. Instrumen angket disebarkan kepada pendidik di beberapa sekolah di sekolah dasar negeri di Surabaya. Analisis data yang digunakan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk memadukan hasil observasi, wawancara, dan angket untuk meningkatkan kredibilitas data yang dianalisis.

## RESULTS AND DISCUSSION

### RESEARCH FINDINGS

Menurut (Prabawati et al., 2020) pada hakekatnya kebijakan public merupakan segala sesuatu yang diumumkan oleh pemerintah tentang apa yang perlu dilaksanakan dan dilarang, merupakan representasi dari tujuan program pemerintah. Pembuatan kebijakan pendidikan merupakan tugas pemerintah sesuai dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi permasalahan yang berlangsung serta bersifat politis (Aziz et al., 2020). Menurut (Idrus et al., 2023) terdapat 4 unsur untuk menganalisa kebijakan dalam pandangan George C. Edward III, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Sikap atau perilaku, dan 4) Struktur birokrasi.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan, bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis dalam pelaksanaannya guna mencapai tujuan pendidikan (Elwijaya et al., 2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia pun mengalami transformasi yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan zaman, kemajuan teknologi, kebutuhan Masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan (Lembong et al., 2023).

Kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar regular di kota Surabaya menjadi hal yang berdampak pada pendidikan di Surabaya (Febriannur Rachman, 2020). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah bagian dari proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan tersebut relevan bagi masyarakat dan dapat diterima. Meskipun perencanaan dan formulasi kebijakan dirancang dengan baik, hasilnya tidak akan optimal jika implementasinya tidak dilaksanakan secara efektif (Munajah et al., 2021). Selaras dengan permendiknas no. 70 tahun 2009 yang terealisasi di kota Surabaya. Peraturan ini menyebutkan pendidikan harus menghibahkan peserta didik kesempatan seluas-luasnya pada akses pendidikan yang merata tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus baik fisik, emosional, mental, maupun sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Penyelenggara pendidikan pun wajib menghargai keberagaman peserta didik serta tanpa adanya tindakan diskriminasi terhadap siapapun (Permendikbud, 2009). Kebijakan ini tentunya memberikan berbagai perspektif dan kebutuhan bagi pendidik utamanya di sekolah dasar. Pengambilan Keputusan kebijakan tentunya dari berbagai pandangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan, penerapan, dan kapasitas pendidik (Prabowo et al., 2024) Berdasarkan teori Edward III kebijakan pendidikan inklusif dapat dianalisa sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi Stakeholder.

Kebijakan ini perlu adanya keberhasilan komunikasi yang intens kepada semua pemangku kepentingan. Hasil wawancara menunjukkan keberagaman pemahaman pendidik mengenai kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan perlu adanya persamaan persepsi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar di Surabaya. Komunikasi dan sosialisasi kepada pendidik perlu ditingkatkan utamanya pendidik kelas yang melaksanakan pembelajaran tanpa adanya guru pendamping khusus.

2. Sumber daya Pendidik.

Keterbatasan esensial dari implementasi kebijakan ini terletak pada minimnya ketersediaan sumber daya pendidik yang kompeten dalam bidangnya dalam hal ini guru pendamping khusus (GPK) serta fasilitas yang sesuai. Hasil wawancara serta angket menunjukkan kesulitan pendidik kelas tanpa adanya pendampingan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidik telah berupaya untuk melaksanakan strategi yang khusus namun membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih sehingga tidak efisien dan efektif. Perspektif ini menunjukkan pada ketidakcukupan sumber daya baik dalam segi ahli dan infrastruktur merupakan penghambat yang signifikan.

3. Sikap dan Perilaku Pendidik.

Keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan perspektif pendidik sebagai garda terdepan pelaksanaannya. Hasil wawancara serta angket menunjukkan adanya spektrum pandangan pendidik yang menunjukkan antusiasme. Pendidik terbuka secara positif terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang berpeluang memberikan kesetaraan dalam proses pembelajaran bagi semua pendidik. Namun sisi lain menunjukkan kekhawatiran pendidik yang signifikan terkait kompetensi dan kesiapan mereka dalam mengelola keberagaman kebutuhan belajar peserta didik.

4. Struktur birokrasi sekolah.

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan efektif di tingkat operasional, struktur organisasi dan kebijakan formal yang berlaku harus memberikan fondasi yang kuat dan dukungan yang nyata. Keluhan dari sejumlah besar pendidik mengenai ketiadaan pedoman praktis yang jelas serta minimnya dukungan administratif yang terstruktur terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini menjadi indikasi kuat bahwa aspek kekuatan struktural dan regulasi perlu mendapatkan perhatian serius dan penguatan yang signifikan. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas, prosedur yang terstandarisasi, dan dukungan administratif yang responsif, potensi kebijakan pendidikan inklusif untuk diwujudkan secara optimal di lapangan akan terhambat, dan para pendidik akan kesulitan menerjemahkan visi inklusif ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Berdasarkan hasil angket serta wawancara pendidik sekolah dasar pun mengalami beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Tugas pendidik menjadi rangkap. Pendidik memerlukan perangkat pembelajaran tambahan dan strategi khusus sehingga beban kerja lebih berat.
2. Kondisi kelas yang tidak kondusif. Ketika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus suasana belajar menjadi kurang kondusif dan efektif.
3. Kondisi berat peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi tertentu menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih sulit.
4. Pendidik kurang fokus. Perhatian pendidik akan terbagi sehingga pembelajaran tidak efisien.
5. Stigma negative dan resistensi masyarakat. Pendidik tidak jarang menerima pandangan negative maupun penolakan dari Masyarakat.

Terlepas dari itu ada beberapa faktor pendukung yang menjadi keberhasilan dari kebijakan pendidikan inklusif. Sebagai berikut :

1. Peran guru pendamping khusus (GPK). Pendidik khusus sangat diperlukan untuk menjadi fasilitator yang optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Kerjasama orang tua dan sekolah. Kerjasama yang terjalin antara orang tua dan sekolah menjadi faktor esensial dalam keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif.
3. Strategi khusus dalam pembelajaran. Pendidik memerlukan strategi yang berbeda dalam mengelola pembelajaran untuk pendidik berkebutuhan khusus agar lebih efektif.
4. Fokus pada keberhasilan yang bersifat perilaku dan sosial.

Keberhasilan pendidikan inklusif tidak dituntut pada tingkat kognitif tetapi terjadinya perubahan perilaku dan sosial menjadi fokus utamanya.

Berdasarkan hasil Analisa wawancara dan angket menunjukkan kinerja pendidik dalam konteks pendidikan inklusif terdapat komitmen dan usaha nyata, tetapi masih terdapat tantangan besar yang perlu difasilitasi. Kebijakan pendidikan inklusif menekankan pentingnya fasilitas yang memadai, pelatihan guru, dan dukungan sistemik—hal-hal yang saat ini menjadi kendala bagi pendidik di lapangan. Kebutuhan pendidik terhadap pelatihan terkait strategi pengajaran inklusif, teknologi adaptif, dan Teknik pengelolaan kelas yang lebih efektif sangat vital.

## CONCLUSION

Dedikasi pendidik dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini sangat tinggi dan berpihak pada keberhasilan seluruh peserta didik. Strategi pembelajaran yang diimplementasikan pendidik telah bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mencapai keberhasilan secara sosial dan perilaku. Namun, hambatan yang dialami pendidik seperti beban kerja, kebutuhan tambahan sumber daya pendamping, serta fasilitas cukup signifikan bagi kinerja pendidik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada dukungan sistemik dari kebijakan pendidikan, termasuk pelatihan guru yang lebih khusus, peningkatan fasilitas, dan kolaborasi erat dengan orang tua serta seluruh tenaga pendidikan terkait. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas dan manfaat pendidikan inklusif, diperlukan sinergi antara komitmen pendidik dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkembang optimal sesuai hak mereka.

## BIBLIOGRAPHY

- Amtu, O., Makulua, K., Matital, J., & Pattiruhu, C. M. (2020). Improving student learning outcomes through school culture, work motivation and teacher performance. *International Journal of Instruction*, 13(4), 885–902. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13454a>
- Anjarwati, Y., Wiwin, P., Nono, H., & Yoenanto, H. (2022). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan: Teori Dan Praktik*, 7(1), 50–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.p50-58>

- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Febriannur Rachman, R. (2020). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Bidayatunah : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 125–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v3i1.518>
- Gerring, J. (2025). *Qualitative Methods*. 45, 43. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415>
- Holmqvist, M., & Lelinge, B. (2021). Teachers' collaborative professional development for inclusive education. *European Journal of Special Needs Education*, 36(5), 819–833. <https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1842974>
- Idrus, S., Ruhana, F., Rani Amalia, M., Fathor Rosyid, A., & Kuswandi, D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DI ERA BISNIS GLOBAL. *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA*, 7(1), 2023.
- Kanya, N., Fathoni, A. B., & Ramdani, Z. (2021). Factors affecting teacher performance. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1462–1468. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21693>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Masnu'ah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (SISDIKNAS). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1).
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Musfira, R. S., Karlina, N., & Susanti, E. (2022). PENGARUH PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP KINERJA GURU DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 30 BANDUNG. *Jurnal Administrasi Negara*, Februari, 13(2), 185–194.
- Pardede, P. F. D., & Fernandes, R. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 272. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.237>
- Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, Pub. L. No. 70 (2009).
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Unesa University Press.
- Prabowo, G., Hafid, A. N., & Bayani, M. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science*

- Research, 4(4), 8324–8334.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13890>
- Saradia Agustina, R., & Rahaju, T. (2021). EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA. *Publika*, 9(3), 109–124.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124>
- Susilowati, T., Trisnamansyah, S., & Syaodih, C. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kata kunci. *JiIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 920–928. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pub. L. No. 20 (2003).